

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sebelum, Saat Dan Sesudah Pandemi Covid-19 menggunakan 5 rasio keuangan. Rasio keuangan meliputi rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dipenelitian ini, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Operasional Pemprov sumbar, dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan PAD dan Belanja Operasioanl Pemprov Sumbar dari 2018-2022 berfluktuatif, dimana rasio pertumbuhan PAD tertinggi terjadi setelah pandemi Covid-19 dengan rasio 13.16%. Sedangkan pertumbuhan PAD terendah terjadi pada saat Covid-19 di tahun 2020 dengan rasio -3,15%. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja operasional tertinggi terjadi sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,91% dan rasio pertumbuhan belanja operasional terendah juga terjadi saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 yaitu sebesar -2,53%.
2. Berdasarkan rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, secara umum Pemprov Sumbar mengalami kenaikan rasio kemandirian dari tahun ke tahun baik itu sebelum, saat dan setelah pandemi Covid-19. Namun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 akibat

pandemi Covid-19. Rasio kemandirian tertinggi terjadi setelah Covid-19 yaitu pada tahun 2022 dengan rasio kemandirian 89.34% dengan pola hubungan delegatif sehingga bisa dikatakan bahwa ketergantungan pada sumber pendapatan luar sudah sedikit atau Pemprov Sumbar sudah mampu untuk mengelola daerahnya dan menjalankan otonomi daerah dengan baik. Rasio kemandirian terendah terjadi pada tahun 2020. hal ini dikarenakan mewabahnya pandemi Covid-19 sehingga tingkat pendapatan masyarakat menjadi turun. Kontribusi pendapatan asli daerah yang rendah menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah pada pendapatan transfer, salah satu penghambatnya yaitu regulasi dan pengelolaan PAD yang belum mendukung dan optimal sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menjadi rendah.

3. Rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan setelah Pandemi Covid-19 mengalami pertumbuhan rasio yang baik. Namun, sempat mengalami penurunan rasio di dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020, rasio efektivitas Pemprov Sumbar sebesar 103,65% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian anggaran pada penerimaan asli daerah berdasarkan kondisi yang terjadi sehingga mengalami penurunan pada pendapatan asli daerah walaupun dengan kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas tertinggi terjadi saat Covid-19 di tahun 2020 yaitu sebesar 103,34% dan rasio pertumbuhan terendah terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018. Realisasi PAD yang rendah juga disebabkan oleh regulasi dan pengelolaan PAD yang

belum optimal sehingga setiap peluang dan potensi yang ada belum terserap dengan baik.

4. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19, rasio efisiensinya tidak terlalu jauh berbeda baik sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19. Rasio efektifitas paling tinggi yaitu terjadi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2022 sebesar 102,85% dengan kriteria tidak efisien dan terendah yaitu saat pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 96,46% dengan kriteria kurang efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum efektif.
5. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan setelah pandemi Covid-19 diketahui bahwa rasio belanja operasi tertinggi terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sebesar 81,13% dan terendah terjadi setelah pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2022 sebesar 65,93%. Pada rasio belanja modal tertinggi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 sebesar 20,13% dan terendah saat pandemi Covid-19 tahun 2021 sebesar 10,30%. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah masih memprioritaskan pada belanja rutin daripada belanja modal pembangunan dimana rasio belanja operasional yang masih lebih besar dari pada belanja modal. Rasio belanja modal yang kecil bisa saja dikarenakan belum mendesaknyanya kebutuhan untuk belanja modal atau aset lama yang sudah ada masih layak untuk dipakai.

6. Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan untuk sebelum dan saat pandemi Covid-19, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan belanja operasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio belanja operasi sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang tergolong rendah sehingga dampaknya pada kinerja keuangan Pemprov Sumbar sebelum dan saat pandemi Covid-19 tergolong rendah. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio belanja modal sebelum dan saat Covid-19. Hal ini dikarenakan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 177/KMK.07/2020, sehingga memberikan dampak yang tergolong besar pada rasio belanja modal

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dianjurkan peneliti. Bagi pemerintah, Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan cukup baik karena secara umum pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, rasio kemandirian juga mengalami peningkatan dan rasio efektivitas Pemprov Sumbar sudah dalam kategori efektif. Namun, diharapkan pemerintah terus menggali dan memanfaatkan setiap potensi dan sumber daya yang ada, dan tidak hanya terfokus pada target yang telah dibuat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kinerja keuangan Pemerintah Provinsi secara lebih mendalam dengan menambah jangkauan dan alat analisis penelitiannya. Peneliti selanjutnya diharapkan menyajikan lebih rinci faktor-faktor penyebab dan regulasi yang digunakan sehingga mempengaruhi kinerja keuangan.